

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu beban konstitusional yang harus dipikul oleh setiap penyelenggara kekuasaan pemerintahan di Indonesia, adalah kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini tersurat jelas pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berkaitan langsung dengan itu, maka dalam pasal 31 konstitusi tersebut dinyatakan secara tegas, bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran (ayat 1) dan, bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang (pasal 2).

Pada bagian lain dari Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan, bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 27 ayat 2).

Sesungguhnya pada sisi lain, yakni secara Islamik (Islam dianut sebagian terbesar warga negara Indonesia), upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyediakan lapangan pekerjaan serta penghidupan yang layak, adalah merupakan kewajiban moral-spiritual. Kewajiban ini terutama terpikul oleh penyelenggara utama kehidupan bersama, dan bahkan juga bagi masing-masing pribadi. Karena itu setiap muslim warga negara diharapkan tanggap terhadap setiap kesempatan dan kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan cerdasnya dan layaknya kehidupan bangsa.

Seperti halnya dengan negara-negara di Dunia Ketiga lainnya, Indonesia juga masih menghadapi masalah keterbelakangan serta masalah kemiskinan (ignorance and poverty) dari sebagian besar rakyatnya. Napitupulu dalam tulisannya (1980: 60) menyatakan antara lain sebagai berikut :

Sebagai negara yang sedang berkembang, kita menghadapi masalah-masalah yang hampir bersamaan : masalah pertambahan penduduk, masalah kemiskinan terutama di pedesaan masalah buta huruf dan masalah keterlantaran pendidikan bagi sebagian anak usia sekolah.

Ciri-ciri kaum miskin itu sebagaimana dikemukakan oleh Emil Salim (1980 : 19), ialah sebagai kelompok penduduk yang tidak cukup mendapatkan kesempatan untuk memperoleh dalam jumlah yang memadai bahan kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, perumahan, fasilitas kesehatan, air minum, kesempatan pendidikan, transportasi dan komunikasi serta kesejahteraan sosial pada umumnya. Karakteristik lain yang mewarnai kehidupan penduduk yang miskin secara material itu adalah tingginya angka kelahiran, kualitas gizi yang rendah, keadaan sanitasi yang buruk serta berkembangnya berbagai kebiasaan hidup dan cara bekerja yang tidak produktif. Keadaan yang demikian secara Islamik adalah kait berkaitan dengan kemiskinan spiritual yang dampak lanjutnya ialah kemiskinan ilmu dan teknologi. Yang terakhir ini sebagaimana telah diketahui adalah fungsi kemajuan masyarakat.

Kemiskinan dan keterbelakangan sebagian besar penduduk itu, pada gilirannya menjadi biang utama rendahnya sumber daya manusia Indonesia di tengah-tengah limpahan sumber daya alam yang dianugerahkan Tuhan.

Kenyataan menunjukkan bahwa Indonesia dikaruniai oleh Tuhan dengan sumber-sumber alam yang melimpah-ruah, letak geografik yang sangat menguntungkan di simpang jalan niaga antar bangsa, serta iklim tropis yang menunjang kesuburan tanah.

Pada sisi lain juga kenyataan menunjukkan, bahwa sejumlah besar dari penduduknya, telah mengalami kemiskinan secara kronis, baik yang sifatnya absolut maupun yang sifatnya relatif. Lebih lagi keadaan yang demikian nampak di daerah pedesaan. Dari berbagai penelitian telah dicatat, bahwa tidak kurang dari 31,1 juta penduduk pedesaan pulau Jawa dalam tahun 1969 hidup di bawah garis kemiskinan. Dalam tahun 1976 jumlah tersebut telah bertambah menjadi 39,4 juta penduduk. Catatan ini menunjukkan bahwa selama tenggang waktu antara 1969-1976, jumlah penduduk di pedesaan pulau Jawa yang hidup di bawah garis kemiskinan telah bertambah cukup banyak yaitu secara persentase sebanyak 9 persen dan secara absolut sebanyak 9,3 juta orang (Sritua Arief, 1979 : 77). Keadaan tersebut di atas dapat digambarkan lebih jelas dalam tabel berikut.

TABEL I

JUMLAH PENDUDUK PEDESAAN PULAU JAWA DI BAWAH
GARIS KEMISKINAN 1969 DAN 1976

Tahun	Jumlah Absolut	Persentase
1969	31,1	52
1976	39,4	61

Sumber : Sritua Arief, 1979, hal. 77

Tidak dapat diingkari, bahwa permasalahan paling menghantui dunia dewasa ini, adalah kemiskinan. Diperkirakan sekitar 800 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan, yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka yang paling mendasar. Masalah yang sama, yakni kemiskinan juga masih merupakan masalah yang dihadapi Indonesia. Diperkirakan pada tahun 1976, paling tidak 50 juta rakyat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Dalam pada itu pendapatan nasional tidak terbagi secara merata. Sebanyak 40 persen penduduk berpendapatan paling rendah, hanya memperoleh 11,15 persen dari seluruh pendapatan nasional, sedangkan 20 persen penduduk berpendapatan paling tinggi, justru memperoleh 56,73 persen dari pendapatan nasional. Ini berarti sebagian kecil penduduk menerima pendapatan yang jauh di atas pendapatan rata-rata perkapita, sementara sebagian besar lainnya hidup miskin. Upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan, sekaligus pemerataan pendapatan yang lebih adil masih sedang berlangsung.

Istilah garis kemiskinan (poverty line) dalam khazanah ekonomi pembangunan, adalah dimaksudkan sebagai batas kebutuhan hidup minimum, yakni suatu standar yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan. Tolok ukur yang sering digunakan ialah pendapatan antara 50 - 75 Dollar US per orang pertahun. Dari segi ini Indonesia memang tidak lagi tergolong ke dalam kelompok negara-negara yang paling miskin, seperti halnya pada masa sebelum dilaksanakannya PELITA I, akan tetapi belum adanya hasil penelitian yang akurat tentang pemerataan hasil pembangunan menyebabkan belum usainya masalah

kemiskinan itu. Pada saat ini memang kita berada dalam masa pembangunan yang menunjukkan kemajuan-kemajuan tertentu secara sangat menyolok. Sebaliknya kemiskinan tetap ada pada kita, dan biarpun arus sumber-sumber daya ke daerah pedesaan belum pernah sebesar seperti dalam satu dasawarsa yang lalu ini, namun kemiskinan itu tidak berkurang (Soedjatmoko, 1980).

Dengan latar belakang ini, kiranya menjadi jelas bahwa masalah kemiskinan masih merupakan suatu masalah yang besar dan mendesak, yang tidak boleh ditunda penanggulangannya. Sudah barang tentu perlu pula disadari, bahwa kemiskinan yang sudah ada sejak lama itu tidak cukup memadai pengetahuan kita terhadap segala seginya. Itulah sebabnya maka se banyak orang membicarakannya, sebanyak itu pula jalan pemecahan yang disarankan.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, kemiskinan dan juga keterbelakangan merupakan biang utama rendahnya sumber daya manusia. Hal ini juga merupakan kenyataan yang dialami Indonesia. Tidak mengherankan bahwa sumber daya manusia Indonesia hingga dewasa ini juga merupakan suatu keadaan yang memprihatinkan. Tingkat produktivitasnya dinilai sangat rendah. Hal ini tidak lepas dari keadaan lapar dan malnutrisi yang diderita hampir sepanjang masa pertumbuhan dan perkembangan dari kebanyakan anak-anak Indonesia generasi demi generasi hingga saat ini. Ditambah lagi dengan layanan kesehatan yang jauh dari memadai, maka mutu gizi yang buruk itu sudah menjadi faktor utama penyebab rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia. Tidak saja pada tingkat produktivitasnya yang rendah, bahkan juga pada pengharapan hidup

(life-expectancy) yang pendek merupakan indikator dari kualitas sumber daya manusiawi yang rendah dari suatu bangsa.

Suatu bangsa yang tidak mampu mengembangkan sumber daya manusianya, tidak akan pernah dapat mengembangkan sesuatu apapun, seperti perekonomian yang kuat, pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan sistem politik yang modern angkatan bersenjata yang tangguh serta kemakmuran yang berkeadilan. Pengembangan ilmu dan teknologi yang pada saat-saat akhir abad ke-20 ini semakin menempatkan diri sebagai salah satu komponen determinatif kemajuan peradaban manusia, juga tidak mungkin dilakukan oleh suatu bangsa dengan kualitas sumber daya manusia yang rendah. Dengan lain perkataan bahwa bangsa dengan sumber daya manusia yang rendah akan tetap terbelakang. Karena terbelakang maka ia tidak mampu melepaskan diri dari belenggu kemiskinan, sedang kemiskinannya itu menyebabkannya terbelakang dan rendahnya mutu sumber daya manusianya. Berdasarkan gambaran proses lingkaran ini, dapat dibenarkan pernyataan-pernyataan, bahwa tak ada satu bangsa yang maju dan modern dengan jumlah buta huruf yang sangat banyak, dan tak ada bangsa yang sebagian besar di antaranya telah mengecap pendidikan yang baik, menjadi terbelakang.

Dengan bertolak dari asumsi bahwa kemiskinan material berkaitan erat dengan kemiskinan pendidikan seperti sudah dikemukakan terdahulu, maka adalah tidak berlebihan meletakkan harapan pada upaya pendidikan sebagai salah satu cara mengatasi masalah kemiskinan tersebut.

Seusai Perang Dunia II timbul penilaian baru terhadap pendidikan serta perspektif mengenai kaitannya dengan ekonomi, negara dan masyarakat. Di negara-negara industri ketika mereka memasuki era teknologi, pendidikan dipandang sebagai tulang punggung perkembangan lanjut mereka. Maksudnya adalah bahwa semakin besar jumlah penduduknya yang bersekolah dan terdidik baik, maka semakin besar pula kemungkinan kemajuan industri, teknologi dan ilmu pengetahuan. Karena itu pembentukan orang-orang terdidik yang baik, adalah berarti pembentukan modal yang sangat penting artinya. Jumlahnya, kualitasnya serta pemanfaatannya merupakan indikator tentang kemampuan ekonomi, militer dan bahkan politik dari masyarakat yang modern.

Di Asia dan Afrika yang merupakan kawasan yang dihuni oleh lebih dari separuh penduduk dunia, muncul negara-negara baru merdeka. Negara-negara baru tersebut dihadapkan kepada keharusan membangun pemerintahan serta institusi-institusi kemasyarakatan lainnya, yang diisi dengan tenaga-tenaga pribumi. Selain itu negara-negara tersebut dihadapkan kepada usaha mendesak untuk menanggulangi kemiskinan, penyakit dan daya produktivitas yang rendah. Dalam memilih dan menetapkan prioritas-prioritas untuk suatu strategi pembangunan, salah satu pilihan utamanya adalah pendidikan (Oteng Sutisna, 1977 : 38-39).

Pandangan atau penilaian yang memberikan arti penting kepada pendidikan itu, nampaknya didasarkan atas pertimbangan tentang manfaatnya bagi bangsa dan negara.

Indonesia seperti juga dengan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, sejak awal kemerdekaannya senantiasa menempatkan pendidikan sebagai salah satu di antara pilihan-pilihan prioritas utama pembangunan. Pendidikan secara serempak dipandang sebagai hak individu dan kewajiban bagi negara. Di satu pihak setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan sedang pada pihak lain negara berkewajiban menyelenggarakan upaya pendidikan dan pengajaran yang dapat menjangkau semua warga negara. Hal ini tersurat secara jelas dalam pasal 31 UUD 1945.

Meskipun setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan, namun kenyataan menunjukkan, bahwa barulah sebagian kecil dari penduduk terutama sepanjang beberapa dasawarsa yang lalu yang dapat menggunakan kesempatan atas haknya tersebut. Sebagian besar lainnya hanya mendapatkan sedikit kesempatan atau bahkan sama sekali tidak berkesempatan sehingga yang terakhir ini tetap dalam keadaan buta huruf. Di antara berbagai faktor yang menyebabkan keterlantaran pendidikan itu yang terutama adalah kemiskinan, di samping faktor-faktor yang tergolong hambatan struktural.

Pembangunan sebagaimana dimaksudkan dalam GBHN, pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Gagasan ini secara ideal dipandang dapat menjawab kebutuhan pemerataan kesempatan mendapatkan hak-hak manusiawi termasuk hak pendidikan, dan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam kerangka ideal itu pulalah pembangunan pada sektor

pendidikan dilaksanakan.

Dalam pada itu GBHN menggariskan, bahwa sistem pendidikan nasional Indonesia didasarkan atas azas pendidikan seumur hidup. Konsep ini mengisyaratkan agar upaya pendidikan, tidak hanya dilaksanakan di sekolah, akan tetapi juga di dalam keluarga dan di lingkungan masyarakat. Hal itu membawa konsekuensi bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Pendidikan juga menjangkau program-program luar sekolah, yaitu pendidikan yang bersifat kemasyarakatan, termasuk kepramukaan, latihan-latihan ketrampilan dan pemberian - tasan buta huruf. Salah satu bentuk kegiatan pendidikan di luar lingkup sistem persekolahan, yang dewasa ini sedang digalakkan, adalah Kelompok Belajar Usaha (Kejar Usaha). Bersama-sama dengan Kelompok Belajar (Kejar) Paket A, Kejar Usaha merupakan usaha pendidikan masyarakat yang pembinaannya dikoordinasikan oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Maksud yang dikehendaki di antaranya adalah sebagai bagian dari usaha pembinaan sumber daya manusia yang belum ditangani oleh pendidikan sistem persekolahan.

Kejar Usaha merupakan suatu kegiatan membelajarkan warga masyarakat untuk mengejar ketinggalan di bidang usaha dengan cara bekerja, belajar dan berusaha, guna memperoleh mata pencaharian sebagai sumber penghasilan yang layak. Kejar Usaha sebagai salah satu program dari Direktorat Pendidikan Masyarakat yang sifatnya bukan murni perusahaan yang

bertujuan semata-mata mencari keuntungan, tetapi perusahaan yang di dalamnya terdapat kegiatan belajar dan berusaha. Unsur bekerja, belajar dan berusaha merupakan ciri khas yang harus menjiwai suatu Kejar Usaha. Diharapkan bahwa melalui Kejar Usaha dapat ditumbuhkan dan dikembangkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap berusaha dari warga belajar sehingga ia memiliki mata pencaharian sebagai sumber penghasilan, demikian pula Kejar Usaha akan memberi pengaruh terhadap pertumbuhan mata pencaharian masyarakat sekitarnya (Direktorat Pendidikan Masyarakat, Ditjen PLSP0, 1985 : 22).

Dapat dikatakan bahwa karakteristik utama yang menandai suatu Kejar Usaha, ialah adanya dua jenis kegiatan di dalamnya, yaitu kegiatan belajar dan kegiatan berusaha. Komponen belajar dan komponen berusaha itulah yang mewarnai dan menjiwai suatu Kejar Usaha. Dalam kaitan itu maka peningkatan penghasilan dalam Kejar Usaha, harus juga merupakan peningkatan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, serta perubahan sikap yang sesuai dengan tuntutan kegiatan bekerja, dan kegiatan berusaha yang dilakukan atau mata pencaharian yang diusahakan.

Kegiatan belajar, bekerja dan berusaha itu dapat meliputi berbagai lapangan mata pencaharian, seperti pertanian, perikanan, peternakan, usaha perdagangan, kerajinan dan pertukangan.

Pembentukan Kejar Usaha didasarkan atas; 1) kebutuhan yang dirasakan bersama, 2) kesatuan minat dan hasrat untuk belajar bersama, 3) keserasian antar anggota dalam kelompok,

4) kesanggupan dan kesediaan untuk belajar berkelompok sampai berhasil, 5) jarak tempat tinggal sesama warga belajar berdekatan.

Sesuai dengan dasar dibentuknya Kejar Usaha seperti dikemukakan di atas, maka program belajarnya disusun bersama antara warga belajar dan sumber belajar, dengan petunjuk dan bimbingan Penilik Pendidikan Masyarakat. Program belajar disusun berdasarkan kebutuhan warga belajar. Karena itu akan terdapat perbedaan program belajar antara Kejar Usaha satu dengan lainnya sebagai akibat perbedaan kebutuhan di antara warga belajar.

Proses belajar dalam Kejar Usaha berlangsung secara terpadu atau terintegrasi dengan proses bekerja dan berusaha. Pengetahuan dan ketrampilan diperoleh warga belajar dari pelaksanaan pekerjaan dan usaha. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan sebagai hasil proses belajar secara langsung berpengaruh terhadap produksi baik jumlah maupun mutunya. Dengan demikian maka proses belajar itu berlangsung antara lain pada saat melakukan pencatatan pembelian bahan baku, pencatatan penjualan hasil produksi, melakukan perhitungan modal, laba dan rugi, melakukan transaksi jual beli dan sebagainya.

Bentuk kegiatan belajar ialah melalui kelompok, yaitu belajar yang dilakukan secara bersama-sama, saling memberi petunjuk tentang apa yang sedang dipelajari. Bentuk kegiatan belajar yang demikian pada prinsipnya tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, akan tetapi senantiasa saling mendukung satu sama lain.

Pada dasarnya dapat dikatakan, bahwa proses terbentuknya suatu Kelompok Belajar Usaha diharapkan sebagai suatu proses yang berlangsung berdasarkan pendekatan "bottom - up". Maksudnya ialah bahwa Kejar Usaha itu dibentuk atas prakarsa dan kesepakatan bersama dari warga masyarakat yang mempunyai kebutuhan dan minat belajar (learning need and interest) yang sama, mempunyai keserasian hubungan dalam kelompok, kesediaan dan kesanggupan belajar serta bekerja sama dalam kelompok, dan bertempat tinggal dalam jarak yang saling berdekatan. Beberapa orang (3 - 10) orang yang memiliki berbagai kesamaan dan kecocokan seperti disebutkan itu, dapat menghimpun diri dalam satu Kejar Usaha dengan jenis mata pencaharian tertentu yang dipilih bersama.

Sebagai suatu bentuk kegiatan pendidikan luar sekolah, Kejar Usaha menetapkan populasi sasarannya, yaitu warga masyarakat yang : 1) berumur 15 - 44 tahun, 2) tidak buta huruf Latin, 3) belum berpenghasilan atau berpenghasilan yang rendah, 4) sudah memiliki ketrampilan tertentu tetapi belum dapat mengusahakan ketrampilan yang dimilikinya menjadi mata pencaharian, 5) sudah mempunyai usaha kecil-kecilan tetapi belum berkembang (Proyek PNF Sul.Sel. 1984 / 1985 : 2).

Melihat pilihan populasi sasarannya, Kejar Usaha sebagai salah satu bentuk kegiatan pendidikan luar sekolah adalah merupakan bagian dari upaya pembangunan di sektor pendidikan yang searah dengan upaya penyediaan lapangan kerja. Juga itu berarti perpanjangan jangkauan usaha layanan

pendidikan bagi rakyat terutama pada lapisan bawah yang banyak mengalami keterlantaran pendidikan, yang pada umumnya hidup dalam kemiskinan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan melaksanakan Kejar Usaha tersebut adalah sebagai berikut.

1. Tujuan umum ;

Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta sikap warga masyarakat agar mampu mengusahakan mata pencaharian sebagai sumber penghasilan serta sumber kesejahteraan hidupnya.

2. Tujuan khusus ;

Setelah warga belajar mengikuti program kegiatan Kejar Usaha, mereka diharapkan:

- (1) dapat mengembangkan dana belajar usaha,
- (2) dapat memasarkan hasil usaha,
- (3) dapat mengelola administrasi usaha,
- (4) mempunyai sumber penghasilan yang tetap dan layak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,
- (5) mempunyai tabungan uang sendiri dari hasil penyisihan yang diperoleh setiap kali usahanya menghasilkan.

Rumusan tujuan yang dikehendaki tersebut di atas nampak cukup ideal baik secara edukatif maupun secara ekonomik mengingat populasi sasaran yang digarap, yaitu rakyat lapisan bawah yang di satu pihak mempunyai potensi pengembangan yang umumnya tidak cukup kuat sementara di lain pihak menghadapi hambatan yang cukup berat.

Sebagai suatu bentuk kegiatan pendidikan luar sekolah untuk membelajarkan warga masyarakat tak berpenghasilan dan berpenghasilan lemah, Kejar Usaha mulai dilaksanakan di Kotamadya Ujung Pandang pada tahun 1978/1979. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rentang waktu sejak waktu itu hingga saat ini, diperkirakan telah mengalami pasang naik dan pasang surut dengan dampak positif dan negatifnya. Dalam kaitan itu maka segi keberhasilan dan atau ketidakterhasilannya merupakan masalah yang menarik untuk diteliti, dan dalam hubungan itulah penelitian dalam rangka penulisan tesis ini dicoba dilaksanakan.

B. Masalah Yang Diteliti

Pelaksanaan kegiatan belajar Kejar Usaha, merupakan realisasi kemauan politik (political will) pemerintah untuk menjawab masalah pemerataan pendidikan dan kesempatan kerja terutama bagi lapisan masyarakat bawah. Meskipun pelaksanaannya yang ideal lebih menghendaki proses dengan pendekatan "bottom-up", akan tetapi agaknya tidak dapat dielakkan adanya model pendekatan "top-down".

Pendidikan seperti dalam pandangan Dewey merupakan suatu proses yang tidak terbatas, yang berlangsung seumur hidup dan dengan metoda "learning by doing", dapat kita jumpai realisasinya pada Kejar Usaha. Juga konsep dari Paulo Freire yang dikenal dengan istilah "conscientization" dengan strategi dialog, merupakan konsep dan strategi yang sesuai dengan hakekat Kejar Usaha sebagai suatu bentuk kegiatan belajar orang dewasa pada umumnya.

Istilah Kejar yang secara harfiah mengandung makna mengejar atau melomba ketertinggalan-ketertinggalan di bidang kerja dan usaha, juga dapat dipandang sebagai dua akronim. Yang pertama adalah singkatan dari kata "bekerja" dan "belajar", kedua adalah singkatan dari kata "kelompok" dan "belajar".

Dalam pengertian "bekerja dan belajar" ini konsep Dewey tentang "learning by doing" menjadi sangat relevan. Dengan bekerja bersama dan belajar bersama dalam kelompok yang ditumbuhkan dan dikembangkan bersama, diharapkan dapat diwujudkan konsep "conscientization" dari Paulo Freire.

Gagasan-gagasan konseptual seperti dikemukakan di atas sangat mudah diucapkan sedang dalam upaya merealisasikannya masih akan dijumpai banyak masalah.

Dalam pada itu patut diketengahkan di sini bahwa upaya pengembangan program dan kegiatan pendidikan luar sekolah, secara teoretik mengacu kepada azas atau prinsip inovasi, penentuan kebutuhan dan tujuan belajar, perencanaan dan pengembangan program (Santoso S.Hamijoyo, 1977 : 36-45) serta azas kebutuhan, azas sepanjang hayat dan azas relevansi program (D.Sudjana, 1983 : 101). Dalam nada yang sama Sanapiah Faisal (1981 : 91) menulis, bahwa jenis dan isi program pendidikan luar sekolah, pada dasarnya bergantung pada kebutuhan belajar populasi sasaran. Isi dan tujuannya harus selalu berorientasi kepada hal-hal yang nyata dan dirasakan sebagai sesuatu yang menyangkut kepentingan kehidupan (life-relevant) dari populasi sasaran.

Oleh karena itulah seperti dikatakan oleh penulis lain, bahwa "need assesment" merupakan "prerequisite" bagi formulasi tujuan dan disain kegiatan belajar luar sekolah. Dikatakan lebih lanjut, bahwa formulasi program pendidikan luar sekolah tidaklah seharusnya mencerminkan persepsi, kecenderungan atau tujuan-tujuan dari supervisor jika diinginkan mencapai hasil yang diharapkan (John D. Ingalls, 1973 : 33) .

Telaah tersebut di atas menunjukkan, bahwa relevansi program pendidikan luar sekolah pada umumnya, dan Kelompok Belajar khususnya, tercermin pada kesesuaiannya dengan kebutuhan dan minat belajar (learning needs and interests) dari populasi sasaran, dan sudah barang tentu dengan kondisi sosio-ekonomik lingkungan sekitar. Informasi mengenai kebutuhan dan minat belajar calon warga belajar dapat diperoleh melalui survai, wawancara, kuesioner dan atau diskusi-diskusi (Knowles, 1953 : 128). Cara-cara yang demikian kiranya dapat juga digunakan dalam hal mencari dan menemukan informasi mengenai kondisi sosio-ekonomik lingkungan sekitar.

Seperti telah dikemukakan lebih dahulu prosedur pengembangan program Kejar Usaha seyogyanya menempuh pendekatan yang lebih bersifat "bottom-up" dari pada pendekatan dalam bentuk "top-down". Dalam kaitan inilah masalah relevansi program diangkat menjadi masalah dalam penelitian studi korelasional ini, terutama karena kenyataan menunjukkan, bahwa bentuk pendekatan "top-down" seringkali muncul lebih banyak dari pada bentuk lawannya.

Warga belajar sebagai individu mempunyai ciri-ciri

Kegiatan belajar serta bekerja dan berusaha yang dilakukan oleh warga belajar dalam Kejar Usaha mempunyai target langsung, yaitu untuk menghasilkan barang atau jasa untuk dipasarkan. Oleh karena itu haruslah menjadi komitmen bagi semua warga belajar dari suatu Kejar Usaha, untuk belajar, bekerja dan berusaha yang secara terintegrasi menuju kepada pencapaian target sasaran tersebut. Bekerja sama dengan dasar prinsip saling menunjang mutlak diperlukan dalam hal ini, oleh karena barang dan atau jasa yang dihasilkan adalah barang dan jasa sebagai hasil serta milik bersama. Dalam hubungan ini maka faktor motivasi umumnya dan motivasi tugas kelompok (group-task motivation) dari warga belajar merupakan salah satu faktor keberhasilan pencapaian target sasaran tersebut.

Tentang peranan motivasi dalam bekerja dan belajar, telah banyak rumusan konseptual dari para ahli. Khusus dalam hal pendidikan non-formal atau pendidikan luar sekolah, faktor motivasi lebih lagi peranannya. Hampir dalam semua tulisannya tentang program Kejar Paket A, Napitupulu (1980) senantiasa mengemukakan, bahwa masalah yang paling rumit dalam Program Kejar Paket A, ialah bagaimana menumbuhkan motivasi pada warga belajar, di samping masalah pengelolannya. Sinyalemen ini kiranya berlaku pula bagi Kejar Usaha.

Program pendidikan akan lebih efektif apabila kegiatan belajar yang dilakukan disesuaikan secara langsung dengan perhatian dan motivasi warga belajar. Oleh karenanya

menjadi masalah bagaimana menumbuhkan dan memelihara motivasi, adalah merupakan masalah nyata, dan yang berkaitan langsung dengan upaya penyediaan kesempatan belajar dan menyediakan kesempatan memperbaiki tingkat kehidupan ekonomi dan sosial. Beberapa di antara program pendidikan non-formal maupun formal mengalami kegagalan oleh karena kurang mengindahkan masalah motivasi yang merupakan dorongan mendasar itu (Coombs & Ahmed, 1973 : 94). Hal yang sama juga dikemukakan oleh Lyra Srinivasan (1976, 1976 : 76), yaitu bahwa proses belajar akan berlangsung secara efektif, serta mudah menyelenggarakannya apabila terdapat motivasi yang kuat pada diri warga belajar.

Dalam kenyataan tidak jarang dijumpai adanya warga belajar yang berhenti mengikuti kegiatan belajar luar sekolah sementara program masih berlangsung, atau mengikutinya dengan tidak sepenuh hati. Hal yang demikian dapat disebabkan antara lain karena mereka tidak melihat adanya keuntungan nyata yang dapat diperoleh, atau tidak yakin bahwa program tersebut mampu memenuhi kebutuhannya yang dianggap mendesak.

Konsep motivasi memang pada dasarnya mencakup adanya dua aspek penting, yaitu kebutuhan (need) atau keinginan (want) dan tujuan (goal). Dari segi ini maka keterlibatan warga belajar dalam Kejar Usaha tidak dapat dipisahkan dengan faktor kebutuhan atau keinginan (need or want) dan tujuan (goal) yang dirasakannya penting. Dengan kata lain intensitas keterlibatan warga belajar dalam program Kejar

Usaha mencerminkan kuat lemahnya dorongan kebutuhan atau keinginan serta kejelasan tujuan yang hendak dicapai oleh warga belajar. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai seringkali merupakan faktor yang potensial yang memperkuat dorongan kebutuhan atau keinginan.

Memahami perilaku individu pada dasarnya adalah memahami motivasi. Termasuk juga dalam hal ini perilaku belajar dalam Kejar Usaha. Dikatakan demikian adalah karena secara psikologis arah dan tujuan sesuatu perilaku tertentu serta dinamikanya ditentukan oleh motivasi yang ada di balik perilaku tersebut. Oleh Young dijelaskan bahwa motivasi merupakan tenaga pendorong, pengarah dan pengatur tindakan. Motivasi mengandung unsur tenaga pendorong, unsur tujuan dan konsistensi energi yang mendorong dan mengarahkan perilaku manusia. Bahwa memahami perilaku pada dasarnya adalah memahami motivasi, adalah sejalan pula dengan pernyataan Krech (1962 : 4), yakni bahwasanya semua tindakan manusia adalah "motivated" dan "goal oriented". Bahwasanya semua tindakan manusia adalah terintegrasikan dalam mana "wants", "emotions" dan "cognitions" secara bersama-sama mempengaruhi tindakan manusia. Dan bahwasanya "the thought and action of individual reflect his wants and goals".

Keinginan dan tujuan individu senantiasa berubah dan berkembang sejalan dengan perubahan dan perkembangan kebutuhannya. Teori yang dikenal berkenaan dengan dinamika perubahan kebutuhan yang hingga dewasa ini sering menjadi sumber acuan Psikologi dan Pendidikan, adalah "teori hierarkhi

kebutuhan" dari Maslow. Dalam teori ini kebutuhan (need) di gambarkan dalam sebuah urutan berjenjang, dari tingkat yang rendah ke tingkat yang tinggi. Kebutuhan yang lebih tinggi baru dirasakan menjadi urgen untuk dipenuhi, jika kebutuhan pada taraf yang lebih rendah dalam urutan sebelumnya telah terpenuhi. Pada saat kebutuhan yang lebih tinggi dapat dipenuhi, maka kebutuhan sebelumnya yang lebih rendah dirasakan menjadi tidak penting lagi.

Dalam sistem kebutuhan berjenjang bertingkat yang dikemukakan Maslow tersebut, tercakup 1) psychological need 2) safety need, 3) belonging and love need, 4) esteem need, dan 5) need for self actualization (Robbins, 1976 : 304) .

Berbeda dengan Maslow, Victor Vroom mengajukan teori "expectancy" yang mengatakan, bahwa seseorang bersedia melakukan sesuatu atau menghasilkan sesuatu pada saat tertentu adalah menurut tujuan yang hendak dicapainya pada saat itu, dan menurut persepsinya bahwa ia akan dapat mencapai tujuan itu (Robbins, 1976 : 372).

Oleh banyak penulis telah diidentifikasi berbagai kebutuhan, di antaranya ialah kebutuhan berafiliasi, kebutuhan akan kewibawaan kekuasaan, kebutuhan akan prestise dan altruistik. Dan dalam lingkup pembicaraan pendidikan yang paling banyak diungkap adalah kebutuhan berprestasi, yang perpanjangannya ialah motif berprestasi atau need of achievement (n-ach). Ciri yang nampak dari kebutuhan jenis ini, ialah, bahwa seseorang selalu cenderung berusaha mencapai prestasi yang terbaik, cenderung untuk selalu terlibat da-

dalam situasi kompetisi, baik dengan orang lain maupun dengan batas optimum kemampuannya sendiri. Kecenderungan tersebut tercermin dalam usahanya yang gigih, tekun, ulet dan penuh gairah untuk selalu mencapai posisi unggul (leading position). Ketertinggalan selangkah di belakang orang lain, atau pencapaian prestasi di bawah batas kemampuan optimumnya sebagaimana yang dipersepsikannya, akan mudah menimbulkan ketidakpuasan, bahkan keresahan.

Berbeda halnya dengan motif berprestasi yang ditunjukkan oleh n-ach itu, maka motivasi tugas-kelompok (group-task motivation) lebih nampak dalam ciri kebersamaan, kerja sama dan saling menunjang baik dalam proses kegiatan maupun dalam pencapaian hasil. Oleh karena itu seseorang dengan latar belakang group-task motivation mempunyai kecenderungan lebih kepada "group-oriented-need behavior" daripada "self-oriented-need behavior". Karena itu pula ia akan lebih cenderung kepada "cooperative situation" daripada "competitive situation". Gejala lainnya yang nampak adalah kecenderungan kepada "group-task performance" sebagai bentuk lawan dari "individual-task performance".

Sebagaimana dikemukakan terdahulu, aktivitas warga belajar dalam Kejar Usaha, secara keseluruhan diarahkan kepada pencapaian hasil produksi untuk keperluan pemasaran. Efektifitas pencapaian hasil tersebut tergantung pada berbagai hal di antaranya kemauan warga belajar untuk secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, bekerja ke arah itu. Kemauan (the willingness) yang demikian tidak terpisah

dari masalah motivasi pada umumnya dan motivasi tugas-kelompok (group-task motivation) khususnya. Sejalan dengan pernyataan ini, Krech menulis antara lain sebagai berikut;

The effectiveness of a group depends, among other things, upon the willingness of the members to work to achieve the formally specified goals of the group. In problem solving and in work groups, the members are engaged in a common task: they discuss a problem to arrive at a group solution; they work together to make a group product. In short, such groups are assumed to have a single goal and their effectiveness in achieving this goal is determined by the degree to which the members of the group are motivated to work for it. (Krech, 1962 : 478).

Berkaitan dengan paparan yang dikemukakan di atas itulah, maka faktor motivasi tugas-kelompok warga belajar Kejar Usaha dipandang dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi keberhasilan Kejar Usaha, dan dengan itu pula diangkat sebagai masalah dalam studi ini.

Apabila dibuat penegasan dari telaah yang telah dikemukakan, maka terdapat tiga variabel penelitian dalam studi ini, yaitu : variabel relevansi program, variabel motivasi tugas-kelompok (group-task motivation) dan variabel keberhasilan Kejar Usaha.

1. Variabel relevansi program.

Kriteria acuan relevansi program Kejar Usaha antara lain ialah a) ketepatan pemilihan alternatif mata pencaharian yang akan diusahakan, dikaitkan dengan minat dan kecakapan dasar calon warga belajar, ketersediaan modal dasar, aset dan bahan baku serta prospek pemasaran, b) keterlibatan unsur-unsur personal utama dalam penentuan alternatif program, yaitu calon warga belajar, Penilik Pendidikan

Masyarakat, serta pemimpin lokal formal maupun informal dan c) prosedur pengambilan keputusan yang tidak berat sebelah.

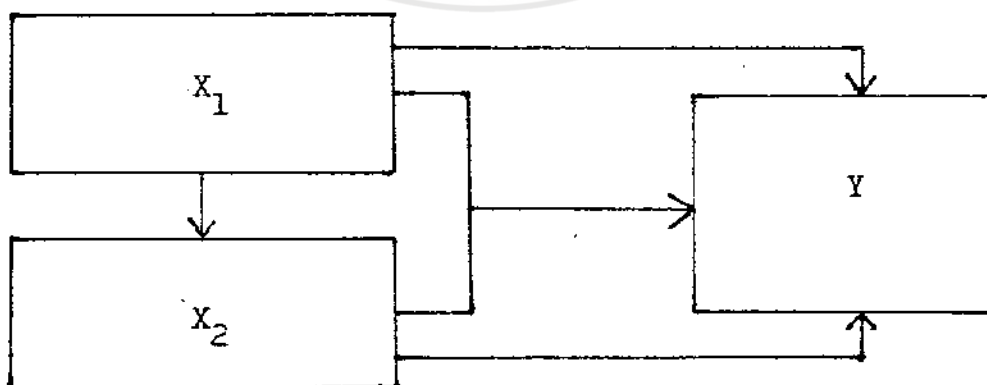
2. Variabel motivasi tugas-kelompok.

Kriteria acuan motivasi tugas-kelompok adalah kecenderungan warga belajar kepada perilaku (belajar dan bekerja) yang berorientasi kepentingan kelompok, lebih mengutamakan kerja sama untuk kemajuan kelompok dari pada bersaing untuk keunggulan sendiri, kecenderungan keterikatan warga belajar terhadap nilai dan norma kelompok serta tanggung jawab sebagai warga kelompok.

3. Variabel keberhasilan Kejar Usaha.

Sebagai kriteria acuan variabel keberhasilan Kejar Usaha, di antaranya ialah a) peningkatan pengetahuan serta ketrampilan sesuai dengan komponen belajar dari Kejar Usaha yang bersangkutan, b) peningkatan dalam sikap keusahawanan pada umumnya, c) peningkatan kemampuan dan sikap kemandirian.

Keterkaitan dan saling hubungan antar variabel tersebut, dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Keterangan: X_1 = Relevansi program kejar usaha.

X_2 = Motivasi tugas-kelompok warga belajar.

Y = Keberhasilan kejar usaha.

Dari paparan yang dikemukakan di atas dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut.

1. Adakah hubungan antara relevansi program kejar usaha dengan keberhasilan kejar usaha.
2. Jika ada, sejauh mana derajat hubungan antara kedua variabel tersebut.
3. Adakah hubungan antara motivasi tugas-kelompok warga belajar dengan keberhasilan kejar usaha.
4. Jika ada, sejauh mana derajat hubungan antara kedua variabel tersebut.
5. Adakah hubungan antara relevansi program kejar usaha dengan motivasi tugas-kelompok warga belajar.
6. Jika ada, sejauh mana derajat hubungan antara kedua variabel tersebut.
7. Adakah hubungan fungsional ganda antara relevansi program kejar usaha dan motivasi tugas-kelompok warga belajar dengan keberhasilan kejar usaha.
8. Jika ada, sejauh mana derajat hubungan antara variabel-variabel tersebut.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum studi ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai perkembangan kegiatan kejar usaha di Kotamadya Ujung Pandang. Selain itu untuk mengungkap adanya kontribusi relevansi program dan motivasi tugas-kelompok terhadap

keberhasilan kejar usaha.

D. Manfaat Penelitian

Dari segi kepentingan pengembangan teori, penelitian ini bermanfaat untuk menguji konsistensi hubungan antara program kegiatan yang dipilih dan motivasi tugas-kelompok, dengan keberhasilan suatu kelompok dalam usaha membelajarkan anggotanya. Di samping itu studi ini diharapkan pula memberikan manfaat terhadap pengujian teori belajar PLS, khususnya yang menyangkut prinsip pengembangan program berdasarkan "learning need and interest" warga belajar, penyesuaian program kegiatan dengan kondisi ekosistem, penggunaan sumber-sumber lokal, dan pelibatan secara aktif warga belajar atau calon warga belajar dalam berbagai tahap kegiatan interaksi belajar.

Berdasarkan fakta empiris yang diperoleh, maka hasil studi ini juga akan memberikan sumbangan terhadap psikologi belajar. Konsep "learning by doing" sebagai cara belajar yang efektif, mendapat dukungan fakta empirik dari penelitian ini. Sebagaimana diketahui dalam kejar usaha terintegrasi secara dinamis kegiatan belajar, bekerja dan berusaha.

Dari segi kepentingan praktis, informasi yang diperoleh akan memberikan sumbangan terhadap cara pendekatan yang efektif dalam pengembangan program kegiatan belajar kelompok, khususnya dalam konteks pendidikan luar sekolah. Pembentukan suatu kelompok belajar usaha yang efektif, adalah yang memperhatikan konsep dan prinsip-prinsip yang dikemukakan di atas, sebagaimana nampak dari hasil studi ini.